

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian praktek akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui praktik akuntansi atas pekerjaan konstruksi aset tetap yang belum selesai sampai dengan tahun anggaran berakhir berkenaan dengan pandemi covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022. Penelitian ini terbatas pada transaksi konstruksi dalam pengerjaan pada periode tahun anggaran 2021. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada Kantor Pusat BPKP telah sesuai dengan PSAP Nomor 08. Sisa pekerjaan yang belum selesai sampai dengan tahun anggaran 2021 berakhir pada Kantor Pusat BPKP telah dilakukan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.05/2021.

Kata kunci: *KDP, PSAP 08, Covid-19, Akuntansi Pemerintah*

Abstract

The purpose of this research is to determine the suitability of construction accounting practices in project at the Head Office of the Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan based on the Statement of Government Accounting Standards number 08 concerning Accounting for Construction in Progress. This research also aims to find out the accounting practices for fixed asset construction that have not been completed until the end of the fiscal year regarding the covid-19 pandemic in accordance with Minister of Finance Regulation number 184/PMK.05/2021 concerning Implementation of the Budget in the Context of Completion of Work During the 2019 Corona Virus Disease Pandemic Which Was Not Completed Until the End of the 2021 Fiscal Year and Will Be Continued in the 2022 Fiscal Year. This research is limited to construction in progress transactions in the 2021 fiscal year. The method used is a qualitative approach. Data collection was carried out using literature review and field studies. The results of the study shows that the implementation of construction accounting in progress at the Head Office of BPKP is in accordance with PSAP Number 08. The remaining unfinished work until the 2021 fiscal year ends at the Head Office of BPKP has been administered in accordance with the Minister of Finance Regulation number 184/PMK.05/2021.

Keywords: Construction in progress, Statement of Government Accounting Standards number 08, Covid-19, Government Accounting